KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK
JL. VETERAN III BANJARWARU CIAWI – BOGOR 16720
TELEPON (0251) 8240752, 8240753, FAKSIMILE (0251) 8240754
WEBSITE: unggas.brmp.pertanian.go.id

ISO : 9001-2015
LSSM-016-IDN

Nomor : B- 535/KU.100/H.5.1/05/2026 6 Mei 2026
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Keuangan *Audited* TA. 2025

Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor
di
Tempat

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-86/PB/2026 tanggal 6 April 2026 dan Surat Kepala KPPN Nomor : S-456/KPN.1304/2026 tanggal 7 April 2026 hal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2025 *Audited*. Bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 (*Audited*) Satker Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak (Kode Satker : 018.09.200.237263.000.KD)

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Kepala Balai,

Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si
NIP 196804181996032001

Kementerian Pertanian

LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN BA.018

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

TAHUN ANGGARAN 2025 (*AUDITED*)



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance).*

Bogor, 6 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si.
NIP 196804181996032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB vi
RINGKASAN LAPORAN 1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 3
II. NERACA 4
III. LAPORAN OPERASIONAL 6
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 8
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 9
A. PENJELASAN UMUM 9
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Pertanian 9
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 10
A.3. Basis Akuntansi 12
A.4. Dasar Pengukuran 12
A.5. Kebijakan Akuntansi 12
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 34
B.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 34
B.2. Belanja 35
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 40
C.1. Kas Di Bendahara Pengeluaran 41
C.2. Kas Di Bendahara Penerimaan 41
C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas 42
C.4. Kas Pada Badan Layanan Umum 42
C.5. Investasi Jangka Pendek – Blu 42
C.6. Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) 42
C.7. Pendapatan yang Masih Harus Diterima 43
C.8. Piutang Bukan Pajak 43
C.9. Bagian Lancar Tagihan Tp/Tgr 43
C.10. Piutang Dari Kegiatan Operasional Blu 44
C.11. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 44
C.12. Persediaan 44

C.13. Tanah 45
C.14. Peralatan dan Mesin 46
C.15. Gedung dan Bangunan 46
C.16. Jalan. Irigasi dan Jaringan 47
C.17. Aset Tetap Lainnya 47
C.18. Konstruksi Dalam Pengerjaan 48
C.19. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 48
C.20. Properti Investasi 49
C.21. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi 49
C.22. Piutang Tagihan TP/TGR 50
C.23. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR 50
C.24. Piutang Jangka Panjang Lainnya 51
C.25. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya 51
C.26. Aset Tak Berwujud 52
C.27. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya 52
C.28. Aset Lain-Lain 53
C.29. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB 53
C.30. Utang Kepada Pihak Ketiga 55
C.31. Utang Yang Belum Ditagihkan 56
C.32. Uang Muka Dari KPPN 56
C.33. Utang Jangka Pendek Lainnya 56
C.34. Ekuitas 57
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 58
D.1. Pendapatan Badan Layanan Umum 58
D.2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 58
D.3. Beban Pegawai 59
D.4. Beban Persediaan 60
D.5. Beban Barang dan Jasa 62
D.6. Beban Pemeliharaan 63
D.7. Beban Perjalanan Dinas 63
D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat 64
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi 65
D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 66

D.11. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 68
D.12. Beban Pelepasan Aset 68
D.13. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 69
D.14. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 76
D.15. Pendapatan Luar Biasa 77
D.16. Beban Luar Biasa 77
D.17. Surplus/Defisit - LO 77
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 78
E.1. Ekuitas Awal 78
E.2. Surplus/Defisit - LO 78
E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar 78
E.4. Transaksi Antar Entitas 80
E.5. Kenaikan (Penurunan) Ekuitas 81
E.6. Ekuitas Akhir 81
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA 82
F.1. Capaian Output 82
F.2. Kegiatan Program Strategis Kementan 83
F.3. Pembentukan Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak 85
F.4. Catatan Dalam Monsakti 86

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternakyang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bogor, 6 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si.
NIP 196804181996032001

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada sampai dengan 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.091.757.034,00 atau 176.67% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.750.006.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp17.520.994.476,00 atau mencapai 96.40% dari alokasi anggaran sebesar Rp18.175.781.000,00.

II. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset. kewajiban. dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp817.129.463.506,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp851.578.959,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp757.864.122.045,00; Properti Investasi (neto) sebesar Rp0,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp202.576.602,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp58.211.185.900,00. Nilai Ekuitas sebesar Rp817.129.463.506,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp817.129.463.506,00.

III. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO. Beban. Surplus/Defisit dari Operasi. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa. Pos Luar Biasa. dan Surplus/Defisit-LO. yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.834.903.034,00. sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp29.421.336.678,00. sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp(26.586.433.644,00). Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing disajikan sebesar Rp7.811.370.740,00 dan Rp0,00 sehingga Balai

Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak pada Tahun 2025 mengalami Defisit-LO sebesar Rp(18.775.062.904,00).

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp821.645.541.358,00 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp18.775.062.904,00). Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang mengurangi Ekuitas sebesar Rp(100.470.000,00), dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp14.359.455.052,00 sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp817.129.463.506,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk juga dalam CaLK adalah pengungkapan informasi yang diharuskan oleh SAP untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
PENDAPATAN NEGARA					
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1				
Pendapatan BLU	B.1.1	-	-	-	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.2	1.750.006.000	3.091.757.034	176.67	3.270.748.698
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA		**1.750.006.000**	**3.091.757.034**	**176.67**	**3.270.748.698**
BELANJA NEGARA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	3.847.295.000	3.844.540.182	99.93	3.469.343.071
Belanja Barang	B.2.2	13.975.856.000	13.325.317.994	95.35	14.049.377.385
Belanja Modal	B.2.3	352.630.000	351.136.300	99.58	69.362.200
JUMLAH BELANJA NEGARA		**18.175.781.000**	**17.520.994.476**	**96.40**	**17.588.082.656**

Bogor, 6 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran.

Dr. Ir. Andi Saenab. M.Si.
NIP 196804181996032001

II. NERACA

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	0	0
Kas pada BLU	C.4	0	0
Investasi Jangka Pendek - BLU	C.5	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	C.6	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.7	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.8	100.964.310	106.964.310
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.9	0	0
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.10	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.11	(10.096.431)	(10.696.431)
Persediaan	C.12	760.711.080	770.609.347
JUMLAH ASET LANCAR		**851.578.959**	**866.877.226**
ASET TETAP			
Tanah	C.13	710.697.857.000	710.697.857.000
Peralatan dan Mesin	C.14	34.327.593.095	33.976.456.795
Gedung dan Bangunan	C.15	75.120.330.659	75.120.330.659
Jalan. Irigasi dan Jaringan	C.16	5.452.646.550	5.452.646.550
Aset Tetap Lainnya	C.17	1.154.325.015	1.154.325.015
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.18	0	0
Akumulasi Penyusutan	C.19	(68.888.630.274)	(64.312.413.949)
JUMLAH ASET TETAP		**757.864.122.045**	**762.089.202.070**
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.20	0	0
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.21	0	0
JUMLAH PROPERTI INVESTASI			
PIUTANG JANGKA PANJANG			

Uraian	Catatan	2025	2024
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.22	225.085.113	418.485.113
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.23	(22.508.511)	(102.008.511)
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.24	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.25	0	0
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		**202.576.602**	**316.476.602**
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.26	8.616.250	21.916.250
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.27	0	0
Aset Lain-lain	C.28	58.219.615.000	58.715.598.400
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.29	(17.045.350)	(364.529.190)
JUMLAH ASET LAINNYA		**58.211.185.900**	**58.372.985.460**
JUMLAH ASET		**817.129.463.506**	**821.645.541.358**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.30	0	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.31	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.32	0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.33	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**0**	**0**
JUMLAH KEWAJIBAN		**0**	**0**
EKUITAS			
Ekuitas	C.34	817.129.463.506	821.645.541.358
JUMLAH EKUITAS		**817.129.463.506**	**821.645.541.358**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**817.129.463.506**	**821.645.541.358**

Bogor, 6 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. Andi Saenab. M.Si.
NIP 196804181996032001

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
Pendapatan BLU	D.1	-	-	-	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2	2.834.903.034	2.617.446.972	217.456.062	8.308
JUMLAH PENDAPATAN		**2.834.903.034**	**2.617.446.972**	**217.456.062**	**8.308**
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	D.3	3.844.540.182	3.469.343.071	375.197.111	10.815
Beban Persediaan	D.4	9.655.469.969	3.805.333.843	5.653.567.012	153.735
Beban Barang dan Jasa	D.5	6.285.488.985	6.878.083.017	(592.594.032)	(8.616)
Beban Pemeliharaan	D.6	1.697.113.870	2.607.047.913	(909.934.043)	(34.903)
Beban Perjalanan Dinas	D.7	373.780.847	506.903.658	(133.122.811)	(26.262)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	D.8	3.053.496.940	1.916.069.471	1.132.117.469	59.363
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	4.576.505.885	5.022.423.059	(445.917.174)	(8.879)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(65.060.000)	100.407.914	(165.467.914)	(164.796)
JUMLAH BEBAN		**29.421.336.678**	**24.305.611.946**	**5.115.724.732**	**21.048**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(26.586.433.644)**	**(21.688.164.974)**	**(4.898.268.670)**	**22.585**
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus/Defisit Pelepasan Aset		46.344.000	(373.616.650)	419.960.650	(112.404)
Pendapatan Pelepasan Aset	D.11	207.854.000	49.479.000	158.375.000	320.085
Beban Pelepasan Aset	D.12	161.510.000	423.095.650	(261.585.650)	(61.827)

Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		**7.765.026.740**	**2.526.052.688**	**5.238.974.052**	**207.398**
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	8.128.706.815	3.212.260.656	4.916.446.159	153.053
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	363.680.075	686.207.968	(322.527.893)	(47.001)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**7.811.370.740**	**2.152.436.038**	**5.658.934.702**	**262.908**
POS LUAR BIASA					
Pendapatan Luar **Biasa**	D.15	**0**	0	0	0
Beban Luar Biasa	D.16	**0**	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(18.775.062.904)**	**(19.535.728.936)**	**760.666.032**	**(3.894)**
SURPLUS/DEFISIT - LO	D.17	**(18.775.062.904)**	**(19.535.728.936)**	**760.666.032**	**(3.894)**

Bogor, 6 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran.

Dr. Ir. Andi Saenab. M.Si.
NIP 196804181996032001

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	**821.645.541.358**	**1.408.563.650.127**
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	**(18.775.062.904)**	**(19.535.728.936)**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	E.3	**(100.470.000)**	**49.037.464**
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	34.890.000	(54.000.000)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3	0	0
Koreksi Lain-lain	E.3.4	0	(66.221.597)
Jumlah		**(135.360.000)**	**169.259.061**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	14.359.455.052	(567.431.417.297)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(4.516.077.852)	(586.918.108.769)
EKUITAS AKHIR	E.6	**817.129.463.506**	**821.645.541.358**

Bogor, 6 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran.

Dr. Ir. Andi Saenab. M.Si.
NIP 196804181996032001

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Pertanian

Pertanian adalah sektor yang mendukung keberlanjutan dan upaya yang terus menerus dalam pengelolaan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan pangan. bahan industri. energi bahkan mempersyaratkan pada pelestarian dan pemberdayaan yang ramah lingkungan. Sejalan dengan Asta Cita Presiden RI ke 8. khususnya berkaitan dengan hilirisasi dan industrialisasi maka disusun organisasi Kementerian Pertanian yang agile dan bertindak sebagai Badan pendukung sesuai Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian. maka didirikan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP).

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) sesuai dengan Pasal 32 dalam Perpres 192/2024 bahwa BRMP memiliki tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian. Kemudian diperjelas dalam fungsi-fungsinya di Pasal berikutnya, yaitu menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis rencana dan program. perekayasaan. perakitan. pengujian. dan penyebarluasan. serta penerapan pertanian modern;
b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perekayasaan. perakitan. pengujian. dan penyebarluasan. serta penerapan pertanian modern;
c. pelaksanaan pemantaltan. analisis. evaluasi. dan pelaporan pelaksanaan perekayasaan. perakitan. pengujian. dan penyebarluasan. serta penerapan pertanian modern;
d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian tanggal 27 Maret 2025. Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak merupakan entitas berkedudukan di Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Kab Bogor 16720 Jawa Barat mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan. perakitan. dan pengujian. serta modernisasi unggas dan aneka ternak. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan. perakitan. dan pengujian. serta modernisasi unggas dan aneka ternak;
2. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi. serta pengujian unggas dan aneka ternak;

3. pelaksanaan produksi benih/bibit sumber. dan hasil perakitan unggas dan aneka ternak;
4. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian unggas dan aneka ternak;
5. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia unggas dan aneka ternak dan penilaian kesesuaian;
6. pelaksanaan pemantauan. evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan. perakitan. dan pengujian. serta modernisasi unggas dan aneka ternak; dan
7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satker Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data. pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-95/PB/2025 tanggal 21 Maret 2025 perihal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 (menyesuaikan surat edaran Kementerian Keuangan per periode pelaporan) sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman https://monsakti.kemenkeu.go.id.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 (sesuai dengen periode pelaporan).

Laporan Keuangan Satker Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 4 Mei 2026 (setelah dilakukan tutup periode permanen).

Pada Tahun Anggaran 2025 Satker BRMP Unggas dan Aneka Ternak menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp16.943.428.000.- Selama periode berjalan. Satker BRMP Unggas dan Aneka Ternak telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini adanya perubahan kebijakan. kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan. terdiri dari:

1. Revisi pemutakhiran hal III DIPA per tanggal 7 Februari 2025 dengan DS:9237-2236-4863-4961

2. Revisi DIPA menyesuaikan dengan kebijakan Blokir anggaran sebesar Rp893.733.000.- terdiri dari:
   a. 6916. BJA Penyidikan dan Pengujian Produk Rp767.033.000.-
   b. 6916.EBA Layanan Dukungan Manajemen Rp126.700.000.
3. Revisi DIPA terkait penambahan pagu sebesar Rp885.000.000.- pada Dukman 6916.EBA Layanan Umum Subkomponen Pendampingan Program Strategis Kementan sehingga per tanggal 25 Maret 2025 dengan DS 9310-1608-1809-0027 pagu anggaran menjadi Rp17.828.428.000
4. Revisi KPA per tanggal 11 April 2025 dengan DS DS:9310-1608-1809-0027
5. Revisi DIPA terkait Perubahan RO dan Blokir Perjadin Program Pendampingan per tanggal 30 April 2025 dengan DS 3114-5306-1200-9704.
6. Revisi KPA mengenai Perubahan Akun Pakan dari Bahan Persediaan Lainnya menjadi Bahan Baku terdapat per tanggal 16 Mei 2025 dengan DS 3114-5306-1200-9704
7. Revisi KPA mengenai Penambahan narasi dan alokasi pada akun 522191 terkait LSPro terdapat perubahan narasi akun 521111 Langganan Daya Jasa, Langganan Internet, penambahan alokasi untuk Internet dari akun telepon, penambahan alokasi untuk perbaikan gedung tidak bertingkat, penambahan alokasi untuk perbaikan wisma, penambahan pada pakan ayam dan aneka ternak akun barang persediaan lainnya, penambahan narasi dan alokasi pada akun 522191 terkait LSPro per tanggal 16 Mei 2025 dengan DS 3114-5306-1200-9704.
8. Revisi POK mengenai Kekurangan Pakan Ternak pada 521821, Gaji PNS ke PPPK dan Penambagan Detail Tunjangan Umum PPPK
9. Revisi POK dan Pemutakhiran halama III DIPA mengenai Program Pendampingan LTT di cutoff karena perubahan lokasi menjadi di Kabupaten Purwakarta
10. Revisi POK terkait Penambahan untuk pemeliharaan peralatan laboratorium;
11. Revisi DIPA terkait Pergeseran Blokir Perjalanan Dinas DUKMAN untuk kegiatan Monev, SPI, Humas, Koordinator Program, Kepegawaian;
12. Revisi DIPA terkait Penambahan Pagu Anggaran dan Buka Blokir dikarenakan Perubahan Target PNBP menjadi 1414 Produk;
13. Revisi DIPA terkait Perbaikan Pagu Minus pada Belanja Gaji Tunjangan Fungsional sebesar 310.000.
14. Revisi DIPA terkait penambahan Anggaran Perjalanan Dinas pada RO Pendampingan Program Strategis Kementan senilai Rp50.000.000,- dari Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Sehingga dalam Laporan Keuangan Tahun 2025 jumlah pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp 18.175.781.000.-

Tabel A.2.1 Anggaran Satuan Kerja
Tahun 2025

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)
2025	18.175.781.000
2024	18.155.909.000
2023	19.600.918.000
2022	31.011.596.000

A.3. Basis Akuntansi

Satker Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca. Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi. tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.
Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip. dasar-dasar. konvensi-

konvensi. aturan-aturan. dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

1. **Pendapatan- LRA**

   Definisi :

   Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

   Pengakuan :

   Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan. pendapatan PNBP. maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

   Pengukuran :

   Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto. yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat. volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

   Penyajian dan Pengungkapan :

   Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing. maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. **Pendapatan- LO**

   Definisi :

   Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

   Pengakuan :

   Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO. Pendapatan PNBP-LO. dan Pendapatan Hibah-LO.

   a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak. melalui self assessment. official assessment. dan Withholding tax system.
   b. Pendapatan PNBP-LO ada 6 (enam) yaitu Pendapatan PNBP-LO perizinan. Pendapatan

PNBP-LO layanan. Pendapatan PNBP-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA). Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah. Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah. dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan. pendapatan bukan pajak. dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional. pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan. pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bru.to dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau hiaya yang timhul akihat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas. baik berupa pengeluaran. konsumsi aset. atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
   Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang. penyusutan aset tetap. dan amortisasi aset tidak berwujud.
b. Terjadinya konsumsi aset
   Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:
   1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
   2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai. pembayaran perjalanan dinas. pembayaran hibah. pembayaran subsidi. dan penggunaan persediaan.
c. Timbulnya kewajiban
   Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timhulnya kewajihan antara lain diakihatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang helum dihayarkan atau akihat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang helum dihayar pemerintah.

Pengukuran :

a. Beban Pegawai
   Beban Pegawai dicatat sehesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajihan pemhayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian. daftar gaji. peraturan perundang-undangan. dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.
b. Beban Persediaan
   Beban persediaan dicatat sehesar pemakaian persediaan herdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan. dan pada akhir tahun hehan persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal herdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perhedaan pencatatan persediaan.
c. Beban Barang dan Jasa
   Beban barang dan jasa dicatat sehesar resume tagihan belanja barang dan jasa. tagihan kewajihan pemhayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK. dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.
c. Beban Pemeliharaan
   Beban pemeliharaan dicatat sehesar resume tagihan belanja pemeliharaan. tagihan kewajihan pemhayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan herdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

d. Beban Perjalanan Dinas
Beban perjalanan dinas dicatat sehesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajihan pemhayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

e. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sehesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat. tagihan kewajihan pemhayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat herdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

g. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian. analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar. Aset Tetap. Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas. bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang. terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan. pengelolaan. dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga. antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penenmaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.
Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.
Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran. Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.
Pengakuan:
Kas dan setara kas diakui pada saat:
a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.
Pengukuran:
Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.
Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.
Penyajian dan Pengungkapan:
Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:
Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
Pengakuan:
Pengeluaran kas dan/ atau aset. penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
Pengukuran:
a) beberapa jenis investasi. terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian. nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal. nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga. misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek). dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli. jasa bank. dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan. maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar. maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu. apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham. misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi. seperti bunga. diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU). dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus a tau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK). investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK. dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akihat Pemerintah telah melakukan pembayaran lehih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersehut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban. dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sehagai beban. Pada akhir periode pelaporan. nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah. namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timhulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan. perikatan. transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang helum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih. yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sehesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua helas) hulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai

piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih. yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timhul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

a) telah diterhitkan surat ketetapan; dan/atau

b) telah diterhitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih. yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban.merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar. kurang lancar. diragukan. dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
d. Kualitas macet apabila:
    1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
    2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas. penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

a. 5% (0.5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian. penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR. perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht

van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

8) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal. jujur. dapat diverifikasi. dan bersifat netral; dan/ atau
b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur. kuitansi. atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual. yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan. catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
   (1) harga pembelian;
   (2) biaya pengangkutan;
   (3) biaya penanganan;
   (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas. Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia

Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

9) Persediaan Tidak Dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda). namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016. Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut. maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya. yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan. maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya. maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan. dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi. maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan. nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

1) Kompenen Biaya Perolehan
2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
3) Pertukaran
4) Penyusutan

   Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

   a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
   b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
   c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

5) Penghentian dan Pelepasan
6) Penilaian kembali
7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Satker Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN. kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai. sewa. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP). Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG). Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI). dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

Aset yang diperoleh dari modalitas pinjaman berbasis syariah

Kementerian Pertanian memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari Islamic Development Bank (IsDB). Saat ini. belum terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang secara spesifik mengatur terkait perlakuan akuntansi atas modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut dalam laporan keuangan. Dalam rangka pelaporan keuangan tahun 2024. transaksi terkait modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut menggunakan kebijakan akuntansi PTA 27 tentang Pengungkapan Pembiayaan Berbasis Syariah pada LKKL, LKBUN. dan LKPP Tahun Anggaran 2024 dengan tambahan pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKKL, LKBUN, dan LKPP.

Pengukuran :

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat ini yang telah diatur dalam PMK 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan PMK 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI). di mana pencatatan realisasi anggaran. Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai. perlu dilakukan pengungkapan lebih detil dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya. tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi. paling sedikit memuat informasi mengenai:

1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
2) Metode penyusutan yang digunakan;
3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
   a) telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
   b) telah diterbitkan:
      (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
      (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
   c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban.merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar. kurang lancar. diragukan. dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
d. Kualitas macet apabila:
    1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
    2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas. penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

a. 5‰ (0.5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak

tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian. penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan. Piutang TPA. Tagihan TP/TGR. Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman. dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA. Tagihan TP/TGR. Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman. dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar. aset tetap. dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud. tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan. aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan). dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah. namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah. namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud. kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
   a) dapat diidentifikasi;
   b) dikendalikan. dikuasai. atau dimiliki entitas;

c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan. maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
   a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
   b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas. jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
   c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
   d) metode amortisasi yang digunakan. jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
   e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
   f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan. jika ada;
   g) penghentian dan pelepasan ATB. jika ada;
   h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama. jika ada;
   i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula. jika ada.
2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyisihan dana. dasar hukum dilakukannya penyisihan. jenis kas yang dibatasi penggunaannya. dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam mengintepretasi hasilnya.
3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-

faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan. jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya. dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang Persediaan secara ekplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j. dijelaskan adalah Hewan dan tanaman. untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/ Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis. seperti pertumbuhan. produksi. dan prokreasi.

Pengakuan:

1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar. jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar. jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca..

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga. Belanja yang Masih Harus Dibayar. Pendapatan Diterima di Muka. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan. dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan. dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan. dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah a tau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan. dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal. selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah. namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

5. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas. surplus/defisit-LO. koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 adalah sebesar Rp3.091.757.034,00 atau 176,67% dari anggaran sebesar Rp1.750.006.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan TA 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel B.1 Anggaran dan Realisasi PNBP TA 2025

Uraian		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
424	**Pendapatan BLU**	**0**	**0**	**0**	**0**
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0	0
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0	0
4249	Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0	0
425	**Pendapatan PNBP Lainnya**	**1.750.006.000**	**3.091.757.034**	**176.67**	**3.270.748.698**
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN. Iuran Badan Usaha. dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.332.056.000	2.541.195.034	190.77	2.382.717.028
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	417.950.000	505.000.000	120.83	503.560.000
4253	Pendapatan Kesehatan. Perlindungan Sosial. Dan Keagamaan	0	0	0	0
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	0	2.562.000	0	770.000
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0	0
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	0	43.000.000	0	220.905.700
4258	Pendapatan Denda	0	0	0	0
4259	Pendapatan Lain-Lain	0	0	0	162.795.970
Jumlah		**1.750.006.000**	**3.091.757.034**	**176.67**	**3.270.748.698**

B.1.1. Pendapatan BLU

Realisasi Pendapatan BLU TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Realisasi Pendapatan BLU TA 2025 adalah sebesar Rp0.00 atau 0% dari anggaran pendapatan BLU sebesar Rp0.00. Satker Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak tidak memiliki layanan BLU.

B.1.2. PNBP Lainnya

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 adalah sebesar Rp3.091.757.034,00 atau 176,67% dari anggaran sebesar Rp1.750.006.000,00. Realisasi pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp178.991.664.00 atau 5,47% dibandingkan TA 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNBP Lainnya TA 2025.

Tabel B.1.2.1 Anggaran dan Realisasi PNBP Lainnya TA 2025

Uraian Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN. Iuran Badan Usaha. dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.332.056.000	2.541.195.034	2.382.717.028	158.478.006
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	417.950.000	505.000.000	503.560.000	1.440.000
Pendapatan Kesehatan. Perlindungan Sosial. Dan Keagamaan	0	0	0	0
Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	0	2.562.000	770.000	2.561.230
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0	0
Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	0	43.000.000	220.905.700	(177.905.700)
Pendapatan Denda	0	0	0	0
Pendapatan Lain-Lain	0	0	162.795.970	(162.795.970)
Jumlah	**1.750.006.000**	**3.091.757.034**	**3.270.748.698**	**(178.222.434)**

Berdasarkan tabel diatas. dapat dijelaskan pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN. Iuran Badan Usaha. dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp2.541.195.034,00 merupakan penerimaaan yang berasal dari Perolehan hasil pertanian. diantaranya penjualan bibit hewan ternak dan hasil sampingnya (benih tanaman afkir. ternak afkir. telur. susu. daging. dll). penjualan peralatan dan mesin.
2. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp505.000.000,00 merupakan penerimaan yang bersumber dari layanan jasa layanan pengujuan dan analisis. diantaranya:
   a. Analisis Pakan Ternak dan Produk Pangan
   b. Jasa Analisis Laboratorium Kimia dan Mineral
3. Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi sebesar Rp2.562.000,00 merupakan kunjungan edukasi terkait peternakan yang dilakukan oleh masyarakat.
4. Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp43.000.000.00 berasal dari angsuran dan pelunasan TP/TGR merupakan pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara atau pejabat lain.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja TA 2025 adalah sebesar Rp17.520.994.476,00 atau 96,40% dari anggaran belanja sebesar Rp18.175.781.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	3.847.295.000	3.844.540.257	99,93	3.469.343.071
Belanja Barang	13.975.856.000	13.325.317.994	95,35	14.049.377.385
Belanja Modal	352.630.000	351.136.300	99,58	69.362.200
Jumlah	**18.175.781.000**	**17.520.994.551**	**96,40**	**17.588.082.656**

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	0	0	0	0.00
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.277.497.000	1.275.426.489	99,84	0.00
Program Ketersediaan. Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	0	0	0	0.00
Program Dukungan Manajemen	16.898.284.000	16.245.568.062	96,14	17.588.082.656
Jumlah	**18.175.781.000**	**17.520.994.551**	**96,40**	**17.588.082.656**

Realisasi belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp67.088.105,00 atau 0,38%. apabila dibandingkan TA 2024. Penurunan tersebut disebabkan karena banyaknya pagu terblokir sampai akhir tahun anggaran sehingga tidak dapat direalisasikan.

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.844.540.257,00 dan Rp3.469.343.071,00. Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp375.197.186,00 atau 10,81 % dibandingkan TA 2024. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya penambahan pegawai selama Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. PPPK gelombang pertama sebanyak 16 orang dan gelombang kedua sebanyak 2 orang
2. CPNS sebanyak 10 orang

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025

Tabel B.2.1.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	3.203.753.000	3.203.224.978	99,98	3.375.339.675
Belanja Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0	0
Belanja Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0	0
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	601.946.000	600.851.279	99,82	45.795.396
Belanja Lembur	41.596.00	40.464.000	97.28	48.208.000
Belanja Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0	0	0	0
Jumlah	**3.847.295.000**	**3.844.540.257**	**99,93**	**3.469.343.071**

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp13.325.317.994,00 dan Rp14.049.377.385,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang TA 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang	**10,370,857,000**	**10,237,618,468**	**98,72**	**9.786.353.290**
Belanja Barang Operasional	3,759,180,000	3,756,362,310	99,93	3.643.063.214
Belanja Barang Non Operasional	1,636,960,000	1,512,264,866	92,38	2.085.947.279
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	-	-		-
Belanja Barang Persediaan	4,974,717,000	4.968.991.292	99,88	4.057.342.797
Belanja Jasa	**1,018,022,000**	**1,016,861,809**	**99,89**	**1.149.072.524**
Belanja Jasa	1,018,022,000	1,016,861,809	99,89	1.149.072.524
Belanja Pemeliharaan	**1.697.477.000**	**1,697,056,870**	**99,98**	**2.607.047.913**
Belanja Pemeliharaan	1.697.477.000	1,697,056,870	99,98	2.607.047.913
Belanja Perjalanan Dinas	**889,500,000**	**373.780.847**	**42,02**	**506.903.658**
Belanja Perjalanan DN	889,500,000	373.780.847	42,02	506.903.658
Belanja Perjalanan LN	-	-	-	-
Belanja BLU	**-**	**-**	-	**-**
Belanja Barang BLU	-	-	-	-
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	**-**	**-**	-	**-**
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	-	-	-	-
Belanja Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	-	-	-	-
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	-	-	-	-
Jumlah	**13.975.856.000**	**13,325,317,994**	**95,35**	**14.049.377.385**

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas. sebesar Rp4.968.991.292,00 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang Persediaan				
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	373.049.000	367.487.542	98,51	362.384.547
Belanja Barang Persediaan bahan baku	2.787.850.000	2.787.697.500	99,99	0
Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Lainnya	1.813.818.000	1.813.806.250	100,00	3.694.958.250
Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0	0
Belanja Pemeliharaan				
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Jumlah	**4.974.717.000**	**4.968.991.292**	**99,88**	**4.057.342.797**

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp351.136.300,00 dan Rp69.362.200,00. Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp281.774.100,00,00 atau 406,24% dibandingkan periode TA 2024. Hal tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh persetujuan revisi kenaikan pagu PNBP sehingga dapat dilakukan belanja modal peralatan dan mesin yang menunjang kegiatan teknis satker untuk menambah PNBP.

Tabel B.2.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	352.630.000	351.136.300	99,58	69.362.200
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Modal BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	**352.630.000**	**351.136.300**	**99,58**	**69.362.200**

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp351.136.300,00 dan Rp69.362.200,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp281.774.100,00 atau 406,24% dibandingkan TA 2024.

Tabel B.2.3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	352.630.000	351.136.300	99,58	69.362.200
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	0.00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0	0	0.00	0
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	0	0.00	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0.00	0
Jumlah	**352.630.000**	**351.136.300**	**99,58**	**69.362.200**

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh. baik oleh pemerintah maupun masyarakat. serta dapat diukur dalam satuan uang. termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp817.126.556.506,00 dan Rp821.645.541.358,00. Saldo Aset per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.518.984.852,00 atau 0,55 % apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1 Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Aset Lancar	851.578.959	866.877.226
Aset Tetap	757.864.122.045	762.089.202.070
Properti Investasi	0	0
Piutang Jangka Panjang	202.576.602	316.476.602
Aset Lainnya	58.211.185.900	58.372.985.460
Jumlah	**817.129.463.506**	**821.645.541.358**

ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp851.578.959,00 dan Rp866.877.226,00. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp15,298,267,00 atau 1,76 %. apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2 Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Piutang Bukan Pajak	100.964.310	106.964.310

Uraian	2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0	0
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(10.096.431)	(10.696.431)
Persediaan	760.711.080	770.609.347
Jumlah	**851.578.959**	**866.877.226**

C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp 0,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.1 Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0	0	0
2	Bank Mandiri No. Rekening 8100122372631000	0	0	0
Jumlah		**0**	**0**	**0**

C.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar R0.00 dan Rp0.00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024.

Tabel C.2.1 Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0	0	0
2	Bank BNI No. Rekening 1784622669	0	0	0
Jumlah		**0.00**	**0**	**0**

C.3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran. Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.
Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Satker Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak tidak memiliki saldo Kas Lainnya dan setara kas lainnya.

C.4. KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM

Kas pada BLU adalah saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.
Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Satker Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak tidak memiliki saldo Kas pada Badan Layanan Umum.

C.5. INVESTASI JANGKA PENDEK – BLU

Investasi Jangka Pendek – BLU adalah investasi pada satker BLU yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
Saldo Investasi Jangka Pendek – BLU pada Kementerian Pertanian hanya ada pada satker BLU di bawah Ditjen PKH yaitu Pusvetma Surabaya, BIB Lembang, dan BBIB Singosari. Satker Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak tidak memiliki Investasi Jangka Pendek – BLU.

C.6. BELANJA DIBAYAR DIMUKA (*PREPAID*)

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akihat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Satker Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak tidak memiliki Belanja Dibayar Dimuka.

C.7. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNBP yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunyauntuk dibayar/ditagih.
Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Satker Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak tidak memiliki Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

C.8. PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp100.964.310,00 dan Rp106.964.310,00. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp6.000.000,00 atau 5,61 % apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.8.1 Saldo Piutang Bukan Pajak per per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Kode Akun	Uraian	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN. Iuran Badan Usaha. dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	2019	100.964.310	106.964.310	(6.000.000)
Jumlah			**100.964.310**	**106.964.310**	**(6.000.000)**

Sampai dengan laporan keuangan *audited* disusun, rincian Piutang Bukan Pajak yang telah diadministrasikan oleh Kementerian Pertanian belum seluruhnya dilengkapi informasi tahun penetapan piutang serta dokumen surat penetapan atau surat penagihan sesuai rincian data belum diadministrasikan dengan baik.

C.9. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan aset lancar berupa Piutang TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian ganti kerugian negara yang telah ditetapkan.

Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Satker Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak tidak memiliki Bagian Lancar Tagihan TP/TGR.

C.10. PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU.

Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Satker Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak tidak memiliki Piutang dari Kegiatan Operasional BLU.

C.11. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp10.096.431,00 dan Rp10.696.431,00. Nilai Penyusutan Piutang Tidak Tertagih sebesar Rp10.096.431,00 merupakan nilai penyusutan piutang yang dihasilkan dari aplikasi SAKTI.

C.12. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp760.711.080,00 dan Rp770.609.347,00. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp9.898.267,00 atau 1,28% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.12.1 Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Uraian Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	295.034.000	337.944.000	(42.910.000)
2	Bahan Baku	287.098.000	218.414.500	68.683.500
3	Persediaan Lainnya	178.579.080	214.250.847	(35.671.767)
Total		**760.711.080**	**770.609.347**	**(9.898.267)**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui terdapat mutasi kurang saldo Persediaan dengan nilai antara lain persediaan berupa hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada

Masyarakat sebesar Rp42.910.000,00, mutasi tambah Bahan Baku sebesar Rp68.683.500,00 dan mutasi kurang persediaan lainnya sebesar Rp35.671.767,00.

ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan. atau dimaksudkan untuk digunakan. dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp757.864.122.045,00 dan Rp762.089.202.070,00 Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.225.080.025,00 atau 0,55% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 . Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	710.697.857.000	710.697.857.000	0
2	Peralatan dan Mesin	34.327.593.095	33.976.456.795	351.136.300
3	Gedung dan Bangunan	75.120.330.659	75.120.330.659	0
4	Jalan. Irigasi dan Jaringan	5.452.646.550	5.452.646.550	0
5	Aset Tetap Lainnya	1.154.325.015	1.154.325.015	0
6	Akumulasi Penyusutan	(68.888.630.274)	(64.312.413.949)	(4.576.216.325)
Jumlah		**759.689.610.292**	**762.089.202.070**	**(4.225.080.025)**

C.13. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp710.697.857.000,00 dan Rp710.697.857.000,00. Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.13.1. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	**Saldo Tanah 31 Desember 2024**	**710.697.857.000**
B	**Mutasi Tambah**	**0**
C	**Mutasi Kurang**	**0**
D	**Saldo Tanah 31 Desember 2025**	**710.697.857.000**

Rincian saldo Aset Tetap Tanah disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.13.2.Rincian Tanah Berdasarkan NUP

No.	NUP	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	1	455.121.988.000	455.121.988.000	0
2	2	145.479.080.000	145.479.080.000	0
3	3	96.997.304.000	96.997.304.000	0
4	4	13.099.485.000	13.099.485.000	0
Jumlah		**710.697.857.000**	**710.697.857.000**	**0**

C.14. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor. alat elektronik. inventaris kantor. dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp34.327.593.095,00 dan Rp33.976.456.795,00. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp351.136.300,00 atau 1,03% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.14.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	**Saldo Peralatan Mesin 31 Desember 2024**	**33.976.456.795**
B	**Mutasi Tambah**	351.136.300
C	**Mutasi Kurang**	**0**
D	**Saldo Peralatan Mesin 31 Desember 2025**	**34.327.593.095**

C.15. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp75.120.330.659,00 dan Rp75.120.330.659,00. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.15.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Gedung Bangunan 31 Desember 20204	75.120.330.659
B	Mutasi Tambah	0
C	Mutasi Kurang	0
D	Saldo Gedung Bangunan 31 Desember 2025	75.120.330.659

C.16. Jalan. Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan. irigasi. dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp5.452.646.550,00 dan Rp5.452.646.550,00. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.16.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2024	5.452.646.550
B	Mutasi Tambah	0
C	Total Mutasi Kurang	0
D	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2025	5.452.646.550

C.17. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas. yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.154.325.015,00 dan Rp1.154.325.015,00. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.17.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2024	1.154.325.015
B	Mutasi Tambah	0
C	Mutasi Kurang	0
D	Saldo Aset Tetap Lainnya 30 Juni2025	1.154.325.015

C.18. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah. peralatan dan mesin. gedung dan bangunan. jalan. irigasi dan jaringan. dan aset tetap lainnya. yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Satker Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak tidak memiliki Konstruksi Dalam Pengerjaan.

C.19. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp(68.888.630.274,00) dan Rp(64.312.413.949,00). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.576.216.325,00 atau 7,12% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.19.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	(33.025.673.326)	(32.202.903.453)	(822.769.873)
2	Gedung dan Bangunan	(32.358.538.063)	(28.740.757.481)	(3.617.780.582)
3	Jalan. Irigasi dan Jaringan	(3.504.418.885)	(3.368.753.015)	(135.665.870)
Jumlah		**(68.888.630.274)**	**(64.312.413.949)**	**(4.576.216.325)**

Jika dibandingkan. terdapat selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.19.2 Selisih Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dengan Nilai Beban Penyusutan

No	Jenis Aset Tetap	Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	(822.769.873)	(822.769.873)	0
2	Gedung dan Bangunan	(3.617.780.582)	(3.617.780.582)	0
3	Jalan. Irigasi dan Jaringan	(135.665.870)	(135.665.870)	0

	Jumlah	**(4.576.216.325)**	**(4.576.216.325)**	0

PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya. dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan. dimanfaatkan oleh masyarakat umum. dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.20. Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Properti Investasi per 31 Desember 31 Desember 2024. Satker Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak tidak memiliki Properti Investasi.

C.21. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024. Satker Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak tidak memiliki Akumulasi Penyusutan Properti Investasi.

PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp225.085.113,00 dan Rp316.476.602,00. Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp193.400.000,00 atau 46,21% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang per 2024. Rincian saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.5 Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Tagihan TP/TGR	225.085.113	418.485.113	(193.400.000)
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR	(22.508.511)	(102.008.511)	79.500.000
Jumlah		**202.576.602**	**316.476.602**	**(113.900.000)**

C.22. Piutang Tagihan TP/TGR

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara. sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp225.085.113,00 dan Rp418.485.113,00. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp193.400.000,00 atau 46,21 % apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR yang disajikan seluruhnya merupakan Piutang Tagihan TGR dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.22.1 Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Debitur	Tahun Penetapan Dokumen	31 Desember 2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Soeharsono	2019	133.085.113	133.085.113	0
Hendi Maulana	2021	92.000.000	135.000.000	(43.000.000)
Yuari Triantono	2022	0	150.400.000	(150.400.000)
Total		**225.085.113**	**418.485.113**	**(193.400.000)**

C.23. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp(22.508.511,00) dan Rp(102.008.511,00). Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp79.500.000,00 atau 77,93% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 2024. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada table berikut.

Tabel C.8.1 Saldo Tagihan TP/TG per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Debitur	Tahun Penetapan Dokumen	31 Desember 2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Soeharsono	2019	(13.308.511)	(13.308.511)	0
Hendi Maulana	2021	(9.200.000)	(13.500.000)	4.300.000
Yuari Triantono	2022	0	(75.200.000)	75.200.000
Total		**(22.308.511.00)**	**(102.008.511)**	**79.500.000**

C.24. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang selain piutang tagihan penjualan angsuran. tagihan TP/TGR. piutang jangka panjang penerusan pinjaman. piutang jangka panjang kredit pemerintah. yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Satker Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak tidak memiliki Piutang Jangka Panjang Lainnya.

C.25. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024. Satker Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak tidak memiliki Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya.

ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud. tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan. aset kerjasama dengan fihak ketiga (kemitraan). dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp58.211.185.900,00 dan Rp58.372.985.460,00. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp161.799.560,00 atau 0,28% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.6 Rincian Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	8.616.250	21.916.250	(13.300.000)
2	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0
3	Aset Lain-lain	58.219.615.000	58.715.598.400	(495.983.400)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain/Amortisasi	(17.045.350)	(364.529.190)	347.483.840
Jumlah		**58.211.185.900**	**58.372.985.460**	**(161.799.560)**

C.26. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp8.616.250,00 dan Rp21.916.250,00. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp13.300.000,00 atau 60,69 % apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.26.1 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	**Saldo ATB 31 Desember 2024**	**21.916.250**
1	Saldo Awal	21.916.250
B	**Mutasi Tambah**	**0**
2	Pembelian	0
3	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
4	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
6	Perolehan Lainnya	0
C	**Mutasi Kurang**	**(13.300.000)**
7	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(13.300.000)
8	Transfer Keluar	0
D	**Saldo ATB 31 Desember 2025**	**8.616.250**

Perbandingan rincian saldo Aset Tak Berwujud disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.26.2 Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Hak Cipta	0	0	0.00
2	Paten	8.616.250	19.916.250	(11.300.000.00)
3	Software	0	2.000.000	(2.000.000.00)
4	Lisensi	0	0	0.00
5	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0.00
6	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0.00
Jumlah		**8.616.250**	**21.916.250**	**(13.300.000)**

C.27. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah. namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah. namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat

ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024. Satker Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak tidak memiliki Dana Yang Dibatasi Penggunaannya.

C.28. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud. kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.
Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp58.219.615.000,00 dan Rp58.715.598.400,00. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp495.983.400,00 atau 0,84 % apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024. Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.28.1 Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Klasifikasi		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap yang dihentikan Penggunaannya	Tanah	0	0	0
		Peralatan dan Mesin	0	0	0
		Gedung dan Bangunan	0	0	0
		Jalan Irigasi Jaringan	0	0	0
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
2	ATB yang Dihentikan Penggunaannya	Aset Tak Berwujud	58.219.615.000	58.715.598.400	495.983.400
3	Belanja 526 Belum Didukung Bukti Pertanggungjawaban	Kegiatan ekstensifikasi lahan Tahun xxxx di Kabupaten xxx Provinsi xxx	0	0	0
Total			**58.219.615.000**	**58.715.598.400**	**495.983.400**

C.29. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa

manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum. peraturan. atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp(17.045.350,00) dan Rp(364.529.190,00). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp347.483.840,00 atau 95,32% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.11.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

No.	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	ATB	Hak Cipta	0	0	0
		Paten	(5.745.350)	(5.455.790)	(289.560)
		Software	0	0	0
		Lisensi	0	0	0
		Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
		ATB Lainnya	0	0	0
	Jumlah		**(5.745.350)**	**(5.455.790)**	**(289.560)**
2	Aset Lain-Lain	Tanah	0	0	0
		Peralatan & Mesin	0	0	0
		Gedung dan Bangunan	0	0	0
		Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0	0
		Aset Tetap Lainnya	0	(345.773.400)	345.773.400
		Aset Tak Berwujud	(11.300.000)	(13.300.000)	2.000.000
	Jumlah		**(11.300.000)**	**(359.073.400)**	**347.773.400**
Total			**(17.045.350)**	**(364.529.190)**	**347.483.840**

KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2024.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.7 Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	0	0	0
2	Utang Yang Belum Ditagihkan	0	0	0
3	Uang Muka Dari KPPN	0	0	0
Jumlah		**0**	0	**0**

C.30. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan. dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan pengganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.30.1 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	0
		Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	0	0	0
	Jumlah		**0**	0	**0**
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang Operasional	0	0	0
		Belanja Jasa	0	0	0
	Jumlah		**0**	0	**0**
Total			**0**	**0**	0

C.31. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan adalah kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga (misalnya rekanan. penyedia barang/jasa). yang belum diterbitkan tagihannya (invoice/SPP/SPM). tetapi sudah ada komitmen atau realisasi transaksi.

Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 tidak mengalami peruahan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024. Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan sebesar Rp499.400.00 merupakan Jasa yang telah diterima oleh Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak namun tagihannya belum diterima oleh satker.

C.32. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024.

C.33. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. misalnya bunga pinjaman. utang jangka pendek dari pihak ketiga. utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). dan bagian lancar utang jangka panjang.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pada satker Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak tidak terdapat saldo Utang Jangka Pendek Lainnya.

C.34. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp817.129.463.506,00 dan Rp821.645.541.358.00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.516.077.852,00 atau 0,55% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah. kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1 Kegiatan Operasional Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Operasional	0	0
Beban Operasional	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	**0**	**0**

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional. seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan Rp2.834.903.034,00 dan Rp2.617.446.972,00. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 tidak mengalami kenaikan sebesar Rp217.456.062,00 atau 8.308% apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2024.

D.1. Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) adalah penerimaan yang diperoleh dari aktivitas operasional BLU dalam menyediakan layanan publik. yang dapat berasal dari pembayaran oleh pengguna layanan. hibah. atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan BLU Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Satker Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak tidak terdapat Pendapatan Badan Layanan Umum.

D.2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak. seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam. pelayanan pemerintah. hasil pengelolaan kekayaan negara. dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.834.903.034,00 dan Rp2.617.446.972,00. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp217.456.062,00 atau 8.308% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2024.
Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 di LRA disajikan sebesar Rp3.085.757.034,00 sedangkan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 di LO disajikan sebesar Rp2.834.903.034,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp250.854.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Rp41.785.000,00 merupakan pendapatan lelang mesin berupa kendaraan
2. Rp166.069.000,00 merupakan pendapatan hasil lelang ternak berupa sapi
3. Rp43.000.000,00 merupakan pendapatan yang merupakan pengembalian negara (TGR)

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang. barang. atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik. melaksanakan program. atau mendukung aktivitas operasional lainnya.
Nilai Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp29.421.336.678,00 dan Rp24.305.611.946,00. Nilai Beban Operasional Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.115.724.732,00 atau 21.048% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Tahun 2024.

D.3. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai. baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.
Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.844.540.182,00 dan Rp3.469.343.071,00. Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 375.197.111,00 atau 10.815% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2024. Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1 Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	3.203.224.903	3.375.339.675	(172.114.772)

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	600.851.279	45.795.396	555.055.883
Beban Lembur	40.464.000	48.208.000	(7.744.000)
Beban Tunj.Khusus dan Bel. Pegawai Transito	0	0	0
Jumlah	**3.844.540.182**	**3.469.343.071**	**375.197.111**

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.2 Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PNS	3.203.224.903	3.203.224.903	0
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	600.851.279	600.851.279	0
Belanja/Beban Lembur	40.464.000	40.464.000	0
Belanja/Beban Tunj.Khusus dan Bel.Pegawai Transito	0	0	0
Jumlah	**3.844.540.182**	**3.844.540.182**	0

Berdasarkan tabel di atas tidak terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO pada Tahun 2025.

D.4. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp9.655.469.969,00 dan Rp3.805.333.843,00. Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.850.136.126,00 atau 153.735%. apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan Tahun 2024.

Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.1 Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	0	0	0
Beban Barang Non Operasional	0	0	0
Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Beban Barang Persediaan	9.655.469.969	3.805.333.843	5.850.136.126
Beban Pemeliharaan	0	0	0
Beban BLU	0	0	0
Beban Barang BLU	0	0	0
Jumlah	**9.655.469.969**	**3.805.333.843**	**5.850.136.126**

*) Nilai Beban Barang termasuk alokasi Beban Barang yang menghasilkan Persediaan BLU

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.2 Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	0	0	0
Belanja/Beban Barang Non Operasional	0	0	0
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Belanja/Beban Barang Persediaan	4.968.991.292	9.655.469.969	(4.686.478.677)
Belanja/Beban Pemeliharaan	0	0	0
Jumlah	**4.968.991.292**	**9.655.469.969**	**(4.686.478.677)**

Berdasarkan tabel di atas. terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp4.686.478.677,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Tercatat sebagai Persediaan	(757.804.080)
Saldo awal	770.609.347
Transfer Keluar	(63.557.390)

Uraian	Nilai
Koreksi Nilai Persediaan	34.890.000
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	7.471.533.440
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	79.052.275
Beban Persediaan Pemeliharaan	(57.000)
Beban Persediaan Hewan Tanaman Diserahkan	(2.484.507.840)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(157.014.075)
Beban Persediaan Rusak/Usang	(206.666.000)
Jumlah	**4.686.478.677**

D.5. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai. peralatan. atau jasa konsultasi. konstruksi. dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp6.285.488.985,00 dan Rp6.878.083.017,00. Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp592.594.032,00 atau 8.616% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.1 Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	5.451.361.785	5.161.057.761	290.304.024
Beban Barang Non Operasional	732.848.200	1.535.475.256	(802.627.056)
Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Beban Barang Persediaan	0	0	0
Beban Jasa			
Beban Jasa	101.279.000	181.550.000	(80.271.000)
Beban BLU			
Beban Barang BLU			0
Jumlah	**6.285.488.985**	**6.878.083.017**	**(592.594.032)**

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.2 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	5.451.361.785	5.451.361.785	0

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang Non Operasional	732.848.200	732.848.200	0
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Belanja/Beban Barang Persediaan	0	0	0
Belanja/Beban Jasa			
Belanja/Beban Jasa	101.279.000	101.279.000	0
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Barang BLU	0	0	0
Jumlah	**6.285.488.985**	**6.285.488.985**	**0**

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO.

D.6. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau asset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset. tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.697.113.870,00 dan Rp2.607.047.913,00. Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp909.934.043,00 atau 34.903% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2024.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA sebesar Rp1.697.113.870,00. nilai Beban Pemeliharaan di LO lebih besar sebesar Rp1.697.113.870,00. Selisih tersebut adalah:

Tabel D.6.1 Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	959.740.625	959.740.625	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	737.316.245	737.316.245	0
Beban Pemeliharaan Jalan. Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	57.000	57.000	0
Jumlah	**1.697.113.870**	**1.697.113.870**	**0**

D.7. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas. yang mencakup transportasi. akomodasi. konsumsi. dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp373.780.847,00 dan Rp506.903.658,00. Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp133.122.811,00 atau 26.262% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA sebesar Rp373.780.847,00. nilai Beban Perjalanan Dinas di LO sama sebesar Rp373.780.847,00. Selisih tersebut adalah:

Tabel D.7.1 Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	334.710.847	334.710.847	0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39.070.000	39.070.000	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	0	0
Belanja Perjalanan	0	0	0
Jumlah	**373.780.847**	**373.780.847**	0

D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.053.496.940,00 dan Rp1.916.069.471,00. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.137.427.469,00 atau 59.363% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.1 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	3.053.496.940	1.916.069.471	1.137.427.469
Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda			
Jumlah	**3.053.496.940**	**1.916.069.471**	**1.137.427.469**

Perbandingan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.2 Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	3.053.496.940	(3.053.496.940)
Belanja/Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			
Belanja/Beban Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda			
Jumlah	**0**	**3.053.496.940**	**(3.053.496.940)**

Berdasarkan tabel di atas. terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp3.053.496.940,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Tercatat sebagai Persediaan	(295.034.000)
Saldo awal	337.944.000
Transfer Keluar	(63.557.390)
Koreksi Nilai Persediaan	(91.377.500)
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	39.420.000
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	3.268.677.830
Beban Persediaan Rusak/Usang	(196.166.000)
Perolehan Saldo Awal	53.590.000
Jumlah	**3.053.496.940**

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp4.576.505.885,00 dan Rp5.022.423.059,00. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp445.917.174,00 atau 8.879% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.9.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap	Peralatan dan Mesin	822.769.873	1.096.981.611	(274.211.738)
		Gedung dan Bangunan	3.617.780.582	3.789.486.016	(171.705.434)
		Jalan Irigasi dan Jaringan	135.665.870	135.665.872	(2)
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah		**4.576.216.325**	**5.022.133.499**	**(445.917.174)**
2	Properti Investasi	Gedung dan Bangunan	0	0	0
	Jumlah		**0**	**0**	**0**
3	ATB	Hak Cipta	0	0	0
		Paten	289.560	289.560	0
		Software	0	0	0
		Lisensi	0	0	0
		Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
		ATB Lainnya	0	0	0
	Jumlah		**289.560**	**289.560**	**0**
4	Aset Lain-Lain	Peralatan & Mesin	0	0	0
		Gedung dan Bangunan	0	0	0
		Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0	0
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
		Aset Tak Berwujud	0	0	0
	Jumlah		**0**	**0**	**0**
Total			**4.576.505.885**	**5.022.423.059**	**(445.917.174)**

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima pembayarannya. baik sebagian maupun seluruhnya. karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp(65.060.000,00) dan Rp(100.407.914,00). Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(165.467.914,00) atau 164.796%

apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.9.1 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Lancar	Piutang Bukan Pajak	0	0	0
		Bagian Lancar TP/TGR	0	0	0
		Piutang dari Kegiatan BLU	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
2	Piutang Jangka Panjang	Tagihan TP/TGR	(65.060.000)	(100.407.914)	(165.467.914)
		Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
	Jumlah		(65.060.000)	(100.407.914)	(165.467.914)
Total			**(65.060.000)**	**(100.407.914)**	**(165.467.914)**

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada Tahun 2025. Kementerian Pertanian mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp(26.586.433.644,00). Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.898.268.670,00 atau 22.585% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp(21.688.164.974,00).

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental. tidak rutin. atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah. meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel D.2 Kegiatan Non Operasional BRMP Unggas Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	46.344.000	(373.616.650)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	7.765.026.740	2.526.052.688
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**7.811.370.740**	**2.152.436.038**

SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp46.344.000,00 dan Rp(373.616.650,00). Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp419.960.650,00 atau 112.404% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

D.11. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp207.854.000,00 dan Rp49.479.000,00. Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp158.375.000,00 atau 320.085% apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

Tabel D.11.1 Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Hasil Penjualan	Surplus (Defisit) Pelepasan (Rp)
Pendapatan dari Penjualan Tanah. Gedung. dan Bangunan	0	0	0	0	0
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	41.785.000	41.785.000	0	41.785.000	41.785.000
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	166.069.000	166.069.000	0	166.069.000	166.069.000
Jumlah	**207.854.000**	**207.854.000**	**0**	**207.854.000**	**207.854.000**

D.12. Beban Pelepasan Aset

Nilai Beban Pelepasan Aset Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp161.510.000,00 dan Rp423.095.650,00. Nilai Beban Pelepasan Aset Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp261.585.650,00 atau 61.827% apabila dibandingkan dengan Beban Pelepasan Aset Tahun 2024.

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp7.765.026.740,00 dan Rp2.526.052.688,00. Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar

Rp5.238.974.052,00 atau 207.398% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

D.13. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp8.128.706.815,00 dan Rp3.212.260.656,00. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.916.446.159,00 atau 153.053% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.13.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025

No.	Uraian			2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
			Terhadap Bendahara	0	0	0
				0	0	0
			Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	0	0
				0	0	0
2	Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	Belanja Pegawai	0	66.600.000	(66.600.000)
			Belanja Barang	0	27.690.870	(27.690.870)
			Belanja Modal	0	68.505.100	(68.505.100)
			Belanja Bantuan Sosial (tahun lalu ada bansos?)	0	0	0
		Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	0	0
3	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset/Jasa	Pendapatan Perolehan Aset/Jasa	Aset Lainnya	8.046.747.540	2.866.495.536	5.174.027.004
				0	0	0

No.	Uraian			2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
4	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Penyesuaian Nilai Persediaan	81.959.275	182.969.150	(103.916.875)
				0	0	0
5	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	0	0	0
Jumlah				**8.128.706.815**	**3.212.260.656**	**4.907.314.159**

Rincian dari pendapatan perolehan aset lainnya sebesar Rp8.046.747.540,00 adalah sebagai berikut :

Uraian	Nilai
Aset Lain-lain	**316.400**
Telur Ayam Sdg	316.400
Bahan Baku Lainnya	**4.671.343.950**
B-Sanplex Injeksi @100 ml_55650	333.900
Gusanex Spray_234000	1.404.000
HI-Pro-Vite 521pokphand_10550	158.250.000
Ivomex Injeksi 50ml_696000	6.960.000
Jarum 18 G Terumo_290000	580.000
Pakan Ayam Grower Phokpand Hi Pro Vite 522_ 9800	372.831.200
Pakan Ayam Grower Sinta S-22_8750	36.750.000
Pakan Ayam Layer Genta Gt-1_8750	82.250.000
Pakan Ayam Layer Phokpand Hi Pro Vite 324-1 _9800	1.183.350.000
Pakan Ayam Starter Br21e_9750	4.875.000
Pakan Grower Hi-Provite 522_9800	3.920.000
Pakan Grower Phoopkand Pakan Ayam Grower Phokpand Hi Pro Vite 522_9700	16.005.000
Pakan Grower Phoopkand Pakan Ayam Grower Phokpand Hi Pro Vite 522_9800	23.030.000

Uraian	Nilai
Pakan Grower Sinta S- 22_8750	88.313.300
Pakan Itik Grower Sinta S22_8550	44.887.500
Pakan Itik Layer GT-1_8550	279.585.000
Pakan itik starter (BR 21 - E)_10000	49.000.000
Pakan Itik Starter BR-21E_9750	58.987.500
Pakan Kelinci Vital Rabbit_7950	61.413.750
Pakan Kelinci Vital Rabbit_8250	66.000.000
Pakan Layar Charoen Phokphand_9600	192.000.000
Pakan Layer Phokpand Hi Pro Vite 324-1 _9700	915.680.000
Pakan Layer Sinta Gt-1 _8750	961.152.500
Pakan Starter sinta BR-21E_10000	34.000.000
Pakan Stater Sinta Br-21e_10000	17.000.000
Pakan ternak C-Prolac_5350	12.527.300
SPUIT 3cc SPUIT 1cc 5cc jarum suntik 3cc spuit white needle_64500	258.000
Barang Persediaan	**568.672.700**
Susu Kambing_15000	2.070.000
Telur Ayam Sdg_700	4.603.900
Telur Ayam Upbs_700	10.056.200
Telur Ayam_700	186.632.600
Telur Bebek_1500	365.310.000
Hewan dan Tanaman	**2.705.913.730**
Afkir Ayam Cemani_10000	310.000

Uraian	Nilai
Afkir Ayam Gaosi_10000	7.280.000
Afkir Ayam Kub Janaka_10000	60.490.000
Afkir Ayam Kub Narayana_10000	11.990.000
Afkir Ayam Kub-1 _10000	1.510.000
Afkir Ayam Sekub_10000	500.000
Afkir Ayam Sensi Abu_10000	8.740.000
Afkir Ayam Sensi Pucak_100000	6.030.000
Afkir Ayam Sensi_10000	2.150.000
Afkir Ayam White Leghorn_10000	4.840.000
AFKIR ENTOK_19000	18.449.000
Afkir Itik Alabi Master_19000	1.843.000
Afkir Itik Alabio_19000	9.966.000
Afkir Itik Mm_19000	2.413.000
Afkir Itik Mojomaster_19000	2.147.000
Afkir Itik Mojosari Jantan_19000	38.000
Afkir Itik Mojosari Putih_19000	5.814.000
Afkir Itik Mojosari_19000	798.000
Afkir Itik Peking_19000	4.674.000
Afkir Itik Pitalah_19000	2.508.000
Afkir Itik Pmp_19000	12.084.000
Afkir Mp_19000	2.204.000
Afkir Peking_19000	2.109.000

Uraian	Nilai
Ayam Cemani Sdg	2.190.000
Ayam Gaosi.	8.020.000
Ayam KUB-1.	5.000.000
Ayam Sensi Abu	11.920.000
Ayam Sensi Kompartemen	5.000.000
Ayam Sensi Pucak	6.300.000
Ayam White Leghorn Sdg	8.450.000
DOC Ayam Cemani	8.250.000
DOC Ayam Gaosi	327.250
DOC Ayam Kalkun	6.500.000
DOC Ayam Kapas	5.500.000
DOC Ayam Ketawa	3.960.000
DOC Ayam Sensi	1.361.200
DOC Gaosi_6545	80.176.250
DOC KUB Janaka_6225	120.217.200
DOC KUB Narayana._6225	18.332.625
DOC KUB-1	1.813.590
DOC KUB-2 Janaka_6225	760.570.500
DOC KUB-2 Narayana_6225	170.297.325
DOC Sensi._6806	123.154.570
DOD Entog	2.500.000
DOD Itik Alabi Master Betina_8500	9.724.000

Uraian	Nilai
DOD Itik Alabi Master Jantan_5600	12.700.800
DOD Itik Master Betina_8500	79.653.500
DOD Itik Master Jantan_5600	54.129.600
DOD Itik Mojomaster Betina_8500	28.152.000
DOD Itik Mojomaster Jantan_5600	18.345.600
DOD Itik PMP Betina	1.191.020
DOD Itik PMP Jantan	2.761.480
DOD Itik Pmp Jantan/ Betina_10540	65.801.220
Entog.	10.773.000
Itik-Alabimaster	63.897.000
Itik-Master	357.181.000
Itik-Mojomaster	110.466.000
Itik-Mojosari Putih	7.581.000
Itik-Peking	5.016.000
Itik-Pitalah	5.339.000
Itik-PMP	105.469.000
Kelinci Hyla	750.000
Kelinci Hyla Lepas Sapih	640.000
Kelinci NZW	250.000
Kelinci NZW Lepas Sapih	440.000
Kelinci REXI	5.400.000
Kelinci Rexi Lepas Sapih	845.000

Uraian	Nilai
Kelinci Satin	600.000
Kelinci-Haycole	1.825.000
Kelinci-Hayla	6.660.000
Kelinci-Nzw	6.165.000
Kelinci-Rexi	11.375.000
Kelinci-Reza	1.885.000
Kelinci-Satin	2.210.000
KUB Janaka	48.230.000
KUB Narayana	10.120.000
KUB-2 Janaka Kompartemen	24.500.000
Rusa Timor	120.000.000
Sekub_10000	1.310.000
White Leghorn	5.800.000
Obat Cair (Persediaan Lainnya)	**3.150.060**
Colibact injeksi @100 ml _ 119510	717.060
Teramicin Salep (23100)	231.000
Vaksin Gumboro A Dosis 500_53600	2.144.000
Vaksin NDIB @500 Dosis (29000)	58.000
Obat Lainnya (Persediaan Lainnya)	**97.350.700**
B375111D-VTM HVT-NDV-RISPENS 2000D ID (Vaksin Marex)_1115050	22.301.000
Cevac NB L 1000 ds_47850	1.914.000
Ivomex super unjeksi @50ml_710000	12.780.000

Uraian	Nilai
Kalbazen_350000	350.000
Oxytocin 10s. 50 ml_98500.	197.000
SPUIT 1cc @100 pcs_176500	353.000
Sulpidon injeksi 100 ml _49800	448.200
Vaksin Marek 2000 Dosis_1115050	55.752.500
Vaksin NDIB 1000 Dosis_47850	957.000
Vaksin ND-IB EDS 500 ml_766000	2.298.000
Grand Total	**8.046.747.540**

Rincian Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan senilai Rp81.959.275,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Koreksi Kuantitas Bahan Baku	79.102.000
2	Koreksi Kuantitas Tambah	2.857.275
Total		**81.959.275**

D.14. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp363.680.075,00 dan Rp686.207.968,00. Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp322.527.893,00 atau 47.001% apabila dibandingkan dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.14.1 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025

No.	Uraian			2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	157.014.075	634.284.968	(477.270.893)
2	Beban Pelepasan Aset	Beban Pelepasan Aset	Beban Persediaan Rusak/Usang	206.666.000	51.923.000	154.743.000

No.	Uraian			2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
3	Kerugian Belum Terealisasi	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	0	0	0
Jumlah				**363.680.075**	**686.207.968**	**322.527.893**

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, Kementerian Pertanian mengalami Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp7.811.370.740,00. Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5.658.934.702,00 atau 262.908% apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp2.152.436.038,00.

POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent). serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

D.15. Pendapatan Luar Biasa

Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa Tahun 2024.

D.16. Beban Luar Biasa

Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Tahun 2024.

D.17. SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada Tahun 2025. Kementerian Pertanian mengalami Defisit LO sebesar Rp(18.775.062.904,00). Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp760.666.032.00 atau 3.894% apabila dibandingkan dengan Defisit LO Tahun 2024 sebesar Rp(19.535.728.936,00).

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp821.645.541.358,00 dan Rp1.408.563.650.127,00. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp586.918.108.769,00 atau 41,67% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.2. SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp(18.775.062.904,00) dan Rp(19.535.728.936,00). Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp760.666.032,00 atau 3,89% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

E.3.1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp34.890.000,00 dan Rp(54.000.000,00). Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp88.890.000,00 atau 164,61% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp53.590.000,00 dan koreksi kurang sebesar Rp18.700.000,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.1.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Persediaan Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	**Koreksi Tambah**	
1	Saldo Awal	53.590.000
B	**Koreksi Kurang**	
1	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	18.700.000

E.3.2. Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi atas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024. Satker Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak tidak memiliki koreksi atas reklasifikasi.

E.3.3. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.3.4. Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp135.360.000,00 dan Rp169.259.061,00. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 2025 mengalami penurunan sebesar Rp304.619.061,00 atau 179,97% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp150.400.000,00 dan koreksi kurang sebesar Rp15.400.000,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.2.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Lain-Lain Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	**Koreksi Tambah**	
1	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	150.400.000.00
B	**Koreksi Kurang**	
1	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	15.400.000.00

E.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana. barang. atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan. seperti pemerintah pusat. pemerintah daerah. atau unit-unit kerja di bawahnya.

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp17.520.994.476.00 dan Rp17.588.082.656.00. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 67.088.180.00 atau 0,38% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.091.757.034,00 dan Rp3.270.748.698,00. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp178.991.664,00 atau 5,47% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian. dengan kementerian/lembaga lain. maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp69.782.390,00 dan Rp581.748.751.255,00. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

mengalami penurunan sebesar Rp581.678.968.865,00 atau 99,99% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.4 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian. dengan kementerian/lembaga lain. maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.5. KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada Tahun 2025. Kementerian Pertanian mengalami kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp(4.516.077.852,00). Nilai kenaikan tersebut lebih tinggi sebesar Rp582.402.030.917,00 atau 99,23% apabila dibandingkan dengan kenaikan/penurunan ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp(586.918.108.769,00).

E.6. EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp817.129.463.506,00 dan Rp821.645.541.358,00. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.516.077.852,00 atau 0,55% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Capaian Output

a. Output kegiatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dalam Laporan Hasil Uji Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang targetnya tercapai.

Kementerian/ Lembaga	Kementerian Pertanian
Unit Organisasi	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Satuan Kerja	Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak
Fungsi	
Sub Fungsi	
Program	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Lokasi	Jawa Barat

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7911.BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk								
	Laporan Hasil Uji Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	1,277,497,000	1,275,426,489	99.84	1414	2448	Produk	100	Sudah mencapai target karena adanya lonjakan pengujian menjelang akhir tahun, realisasi sudah berjalan seluruhnya
	Subtotal	1,277,497,000	1,275,426,489	99.84	1414	2448	Produk	100	
	Penyesuaian (Revisi								
	Total	1,277,497,000	1,275,426,489	99.84	1414	2448	Produk	100	

b. Output kegiatan Dukungan Manajemen Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian, Layanan BMN, Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, Layanan Umum, Layanan Perkantoran, dan Layanan Pemantauan dan Evaluasi yang targetnya tercapai sehingga realisasi muncul setelah tahun anggaran berakhir atau dana telah habis.

Kementerian/ Lembaga	Kementerian Pertanian
Unit Organisasi	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Satuan Kerja	Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak
Fungsi	
Sub Fungsi	
Program	Dukungan Manajemen
Lokasi	Jawa Barat

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6918.AEA	Koordinasi								
	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	935,000,000	349,184,224	37.35	1	1	Kegiatan	100.00	
	Subtotal	935,000,000	349,184,224	37.3459	1	1	Kegiatan	100.00	

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6918.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal								
	Layanan BMN	10,000,000	8,776,483	87.76	1	1	Layanan	100.00	Kegiatan sudah berjalan dan sudah terlaksana
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	14,000,000	10,781,880	77.01	1	1		100.00	Kegiatan sudah terlaksana
	Layanan Umum	166,300,000	117,520,591	70.67	1	1	Layanan	100.00	Kegiatan sudah terlaksana
	Layanan Perkantoran	15,753,284,000	15,745,047,884	99.95	1	1	Layanan	100	Kegiatan sudah terlaksana
	Subtotal	15,943,584,000	15,882,126,838	99.61	4	4	Layanan	100.00	
6918.EBD									
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	19,700,000	14,257,000	72.37	1	1	Dokumen	100.00	Kegiatan sudah terlaksana
	Subtotal	19,700,000	14,257,000	72.37	1	1	Dokumen	100.00	
	Penyesuaian (Revisi								
	Total	16,898,284,000	16,245,568,062	96.14	6	6	Layanan, Kegiatan & dokumen	100.00	

F.2. Kegiatan Program Strategis Kementan

Kegiatan pendampingan program strategis nasional menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Pertanian yang menetapkan perubahan substansi mengenai target luasan dan penanggung jawab di provinsi/kabupaten/kota dalam upaya peningkatan produksi pangan strategis melalui program Luas Tambah Tanam (LTT) sebagai salah satu indikator utama keberhasilan ketahanan pangan nasional yang dalam hal ini komoditasnya adalah padi. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian 2 Republik Indonesia Nomor 458/Kpts/PW.020/M/06/2025 tanggal 26 Juni 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 109/Kpts/PW.020/M/03/2025 tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasebada Pangan, Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak mengemban tanggung jawab di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di daerah Kabupaten Purwakarta.

Perubahan ruang lingkup serta penyesuaian output kegiatan dari “dukungan terhadap pelaksanaan program strategis” menjadi spesifik pada pendampingan program Luas Tambah Tanam (LTT) yang diiringi dengan penajaman indikator kinerja kegiatan serta target pada kegiatan swasembada pangan sebagaimana disajikan pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel F.1.1. Penanggung Jawab serta Target Program LTT Kabupaten Purwakarta Jawa Barat

No	Provinsi dan Kabupaten	Penanggung Jawab	Optimalisasi Lahan (Ha) 2025	Target Brigade Pangan	Target LTT Reguler	Target Padi Gogo

1	Kabupaten Purwakarta	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak	1.425	7	52.780	394

Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi pertanian cukup signifikan, khususnya dalam budidaya tanaman padi. Dalam rangka mendukung program peningkatan produksi pangan nasional, kegiatan Luas Tambah Tanam (LTT) dan optimalisasi lahan padi terus diakselerasi oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian setempat, dengan dukungan pemerintah pusat.

Kegiatan optimalisasi dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara lain:

- Pemanfaatan lahan-lahan tidur atau lahan bera untuk ditanami padi gogo, terutama di wilayah dengan keterbatasan irigasi.
- Pemberian benih padi gogo kepada kelompok tani, disertai bimbingan teknis oleh penyuluh.
- Penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) secara bergilir untuk mendukung percepatan tanam.

Produksi Padi Total Lahan Sawah + Lahan Bukan Sawah

NO.	KECAMATAN	Luas Baku Lahan	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Total
			Produksi GKG (Ton)	Produksi GKG (Ton)	Produksi GKG (Ton)	Produksi GKG (Ton)	Produksi GKG (Ton)	Produksi GKG (Ton)	Produksi GKG (Ton)	Produksi GKG (Ton)
1	JATILUHUR	435	1607	621	1607	392	65	91	229	4612
2	SUKASARI	566	803	2757	803	20	196	392	183	5154
3	MANIIS	659	0	3913	457	0	0	0	0	4370
4	TEGALWARU	1410	1783	6976	1849	59	327	85	0	11079
5	PLERED	1420	1457	5252	1457	327	692	973	2652	12809
6	SUKATANI	1210	2221	3775	2221	705	686	947	2018	12574
7	DARANGDAN	1613	2521	2613	2521	2619	2979	2521	3201	18975
8	BOJONG	1190	1738	1600	1738	1542	1463	1372	1587	11039
9	WANAYASA	1526	2430	2580	2430	0	1685	1777	3168	14070
10	KIARAPEDES	1094	928	954	928	1091	2077	1568	379	7923
11	PASAWAHAN	1222	2992	2593	2992	967	1012	967	745	12267
12	PONDOKSALAM	1589	3325	1489	3325	2443	2038	1555	2005	16180
13	PURWAKARTA	520	1542	131	1542	1306	405	0	72	4997
14	BABAKANCIKAO	575	653	1692	653	477	105	20	65	3664
15	CAMPAKA	819	3214	353	3220	1372	235	124	849	9367
16	CIBATU	1343	3371	3887	3573	751	438	307	973	13300
17	BUNGURSARI	779	2397	65	2397	2162	0	13	78	7113
	JUMLAH	**17970**	**32980**	**41250**	**33712**	**16232**	**14403**	**12711**	**18205**	**169493**

Tabel F.1.2. Realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) Padi

Target (Ha)	Realisasi	Persentase
52.780	23.612	44,74 %

*per Desember 2025

Kabupaten Purwakarta hingga saat ini belum mampu mencapai target luas tanam padi sebesar 52.780 hektar, dan realisasi luas tanam yang dapat dicapai hanya sebesar 44.303 hektar (Apabila dihitung dari bulan Januari 2025-Desember 2025). Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 458/Kpts./PW.020/M/06/2025

tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 109/Kpts./PW.020/M/03/2025 tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota Pada Kegiatan Swasembada Pangan bahwasannya Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak tertanggal 26 Juni 2025 menjadi Penanggung Jawab Kabupaten Purwakarta. Sehingga apabila dihitung berdasarkan realisasi bulan Juni-Desember 2025 didapatkan hasil realisasi LTT Reguler sebesar 23.612 Ha. Kondisi ini bukan disebabkan oleh rendahnya upaya atau kinerja sektor pertanian, melainkan lebih dipengaruhi oleh keterbatasan teknis dan kondisi eksisting lahan sawah di beberapa wilayah. Target luas tanam padi sebesar 52.780 hektar pada dasarnya merupakan hasil perhitungan dari luas baku sawah Kabupaten Purwakarta seluas 17.970 hektar yang dikalikan dengan tiga kali musim tanam dalam satu tahun (Indeks Pertanaman/IP 300). Secara teoritis, apabila seluruh luas baku sawah dapat ditanami padi sebanyak tiga kali dalam setahun, maka target tersebut dapat dicapai. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa asumsi tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan.

Faktanya, dari total luas baku sawah yang ada, terdapat sejumlah desa dan hamparan sawah yang secara teknis tidak memungkinkan untuk melaksanakan IP 300. Keterbatasan tersebut antara lain disebabkan oleh ketersediaan air irigasi yang belum merata sepanjang tahun, ketergantungan pada curah hujan, kondisi jaringan irigasi yang belum optimal, serta karakteristik lahan dan agroklimat setempat. Pada wilayah-wilayah tersebut, petani umumnya hanya mampu melakukan penanaman padi satu hingga dua kali dalam setahun (IP 100–200). Akibat keterbatasan penerapan IP 300 pada sebagian luas baku sawah tersebut, maka tidak seluruh lahan dapat berkontribusi secara maksimal dalam mendukung pencapaian target luas tanam. Hal ini secara langsung berdampak pada akumulasi total luas tanam padi tahunan Kabupaten Purwakarta. Dengan mempertimbangkan kondisi riil tersebut, luas tanam padi yang secara realistis dapat direalisasikan hanya mencapai 23.612 Ha, yang merupakan akumulasi dari lahan-lahan dengan kemampuan IP yang bervariasi. Realisasi anggaran sebesar Rp349.184. 224,00 dengan pagu Rp351.600.00,00.

Dengan demikian, selisih antara target dan realisasi luas tanam padi bukan merupakan bentuk kegagalan program, melainkan cerminan kondisi objektif di lapangan. Keterbatasan kemampuan sebagian lahan sawah dalam mendukung IP 300 menyebabkan Kabupaten Purwakarta belum dapat mencapai angka target 52.780 hektar. Oleh karena itu, capaian luas tanam padi sebesar 23.612 hektar dapat dikatakan telah mencerminkan potensi riil dan daya dukung lahan pertanian yang ada di Kabupaten Purwakarta saat ini.

F.3. Pembentukan Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan

Dan Modernisasi Pertanian tanggal 27 Maret 2025. Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak merupakan entitas berkedudukan di Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Kab Bogor 16720 Jawa Barat yang mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan. perakitan. dan pengujian. serta modernisasi unggas dan aneka ternak. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102. Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan. perakitan. dan pengujian. serta modernisasi unggas dan aneka ternak;
2. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi. serta pengujian unggas dan aneka ternak;
3. pelaksanaan produksi benih/bibit sumber. dan hasil perakitan unggas dan aneka ternak;
4. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian unggas dan aneka ternak;
5. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia unggas dan aneka ternak dan penilaian kesesuaian;
6. pelaksanaan pemantauan. evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan. perakitan. dan pengujian. serta modernisasi unggas dan aneka ternak; dan
7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak.

F.4. CATATAN DALAM MONSAKTI

1. TO DO LIST

-

2. Rekonsiliasi

Rekon Selesai, hasil Rekonsiliasi terbentuk. Tanggal SHR 21-01-2026 tidak terdapat TDK RUPIAH, TDK COA, dan TDK DETAIL.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA BARAT

KPPN BOGOR

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 237263 - BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 4:19
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	18,175,781,000	18,175,781,000	0
2	Belanja	17,520,994,551	17,520,994,551	0
3	Pengembalian Belanja	-75	-75	0
4	Estimasi Pendapatan	1,750,006,000	1,750,006,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	3,091,757,034	3,091,757,034	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

DATA KOREKSI DIBUKUKAN BERBEDA ANTARA SATKER DENGAN KPPN

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018

ESELON I : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09

SATUAN KERJA : BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK 237263

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 3:01 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**1,750,006,000**	**3,091,757,034**	**1,341,751,034**	**177**	**824,026,000**	**3,270,748,698**	**(2,446,722,698)**	**397**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,750,006,000	3,091,757,034	1,341,751,034	177	824,026,000	3,270,748,698	(2,446,722,698)	397
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**1,750,006,000**	**3,091,757,034**	**1,341,751,034**	**177**	**824,026,000**	**3,270,748,698**	**(2,446,722,698)**	**397**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	18,175,781,000	17,520,994,476	(654,786,524)	96	18,155,909,000	17,588,082,656	567,826,344	97
1. Belanja Pegawai	3,847,295,000	3,844,540,182	(2,754,818)	100	3,575,651,000	3,469,343,071	106,307,929	97
2. Belanja Barang	13,975,856,000	13,325,317,994	(650,538,006)	95	14,510,258,000	14,049,377,385	460,880,615	97
3. Belanja Modal	352,630,000	351,136,300	(1,493,700)	100	70,000,000	69,362,200	637,800	99
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **KEMENTERIAN PERTANIAN 018**

ESELON I : **BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09**

SATUAN KERJA : **BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK 237263**

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 3:01 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**18,175,781,000**	**17,520,994,476**	**(654,786,524)**	**96**	**18,155,909,000**	**17,588,082,656**	**567,826,344**	**97**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :

FINAL

Bogor, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

IR. ANDI SAENAB
NIP 196804181996032001

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (237263) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 3:03 PM

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	100,964,310	106,964,310	(6,000,000)	(5.61)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(10,096,431)	(10,696,431)	600,000	(5.61)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	90,867,879	96,267,879	(5,400,000)	(5.61)
Persediaan	760,711,080	770,609,347	(9,898,267)	(1.28)
JUMLAH ASET LANCAR	**851,578,959**	**866,877,226**	**(15,298,267)**	**(1.76)**
ASET TETAP				
Tanah	710,697,857,000	710,697,857,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	34,327,593,095	33,976,456,795	351,136,300	1.03
Gedung dan Bangunan	75,120,330,659	75,120,330,659	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5,452,646,550	5,452,646,550	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	1,154,325,015	1,154,325,015	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(68,888,630,274)	(64,312,413,949)	(4,576,216,325)	7.12
JUMLAH ASET TETAP	**757,864,122,045**	**762,089,202,070**	**(4,225,080,025)**	**(0.55)**
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	225,085,113	418,485,113	(193,400,000)	(46.21)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(22,508,511)	(102,008,511)	79,500,000	(77.93)
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	202,576,602	316,476,602	(113,900,000)	(35.99)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	**202,576,602**	**316,476,602**	**(113,900,000)**	**(35.99)**
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	8,616,250	21,916,250	(13,300,000)	(60.69)
Aset Lain-lain	58,219,615,000	58,715,598,400	(495,983,400)	(0.84)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(17,045,350)	(364,529,190)	347,483,840	(95.32)
JUMLAH ASET LAINNYA	**58,211,185,900**	**58,372,985,460**	**(161,799,560)**	**(0.28)**
JUMLAH ASET	**817,129,463,506**	**821,645,541,358**	**(4,516,077,852)**	**(0.55)**

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	817,129,463,506	821,645,541,358	(4,516,077,852)	(0.55)
JUMLAH EKUITAS	**817,129,463,506**	**821,645,541,358**	**(4,516,077,852)**	**(0.55)**
JUMLAH EKUITAS	**817,129,463,506**	**821,645,541,358**	**(4,516,077,852)**	**(0.55)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**817,129,463,506**	**821,645,541,358**	**(4,516,077,852)**	**(0.55)**

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : **(018) KEMENTERIAN PERTANIAN**

UNIT ORGANISASI : **(09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**

WILAYAH/PROVINSI : **(0200) JAWA BARAT**

SATUAN KERJA : **(237263) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 3:03 PM

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

Bogor, 6 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

IR. ANDI SAENAB

NIP 196804181996032001

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **(018) KEMENTERIAN PERTANIAN**

ESELON I : **(09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**

WILAYAH/PROVINSI : **(0200) JAWA BARAT**

SATUAN KERJA : **(237263) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 3:00 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,834,903,034	2,617,446,972	217,456,062	8.308
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	2,834,903,034	2,617,446,972	217,456,062	8.308
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	2,834,903,034	2,617,446,972	217,456,062	8.308
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,844,540,182	3,469,343,071	375,197,111	10.815
Beban Persediaan	9,655,469,969	3,805,333,843	5,850,136,126	153.735
Beban Barang dan Jasa	6,285,488,985	6,878,083,017	(592,594,032)	(8.616)
Beban Pemeliharaan	1,697,113,870	2,607,047,913	(909,934,043)	(34.903)
Beban Perjalanan Dinas	373,780,847	506,903,658	(133,122,811)	(26.262)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	3,053,496,940	1,916,069,471	1,137,427,469	59.363

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **(018) KEMENTERIAN PERTANIAN**

ESELON I : **(09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**

WILAYAH/PROVINSI : **(0200) JAWA BARAT**

SATUAN KERJA : **(237263) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 3:00 PM

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	4,576,505,885	5,022,423,059	(445,917,174)	(8.879)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(65,060,000)	100,407,914	(165,467,914)	(164.796)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	29,421,336,678	24,305,611,946	5,115,724,732	21.048
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(26,586,433,644)	(21,688,164,974)	(4,898,268,670)	22.585
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	46,344,000	(373,616,650)	419,960,650	(112.404)
Pendapatan Pelepasan Aset	207,854,000	49,479,000	158,375,000	320.085
Beban Pelepasan Aset	161,510,000	423,095,650	(261,585,650)	(61.827)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	7,765,026,740	2,526,052,688	5,238,974,052	207.398
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	8,128,706,815	3,212,260,656	4,916,446,159	153.053
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	363,680,075	686,207,968	(322,527,893)	(47.001)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7,811,370,740	2,152,436,038	5,658,934,702	262.908
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(18,775,062,904)	(19,535,728,936)	760,666,032	(3.894)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(18,775,062,904)	(19,535,728,936)	760,666,032	(3.894)

Keterangan :

FINAL

Bogor, 6 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

IR. ANDI SAENAB

NIP 196804181996032001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (237263) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

Tgl Data : 06/05/26 12:35 PM
Tgl Cetak : 06/05/26 3:01 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	821,645,541,358	1,408,563,650,127	(586,918,108,769)	(41.67)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(18,775,062,904)	(19,535,728,936)	760,666,032	(3.89)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(100,470,000)	49,037,464	(149,507,464)	(304.88)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	34,890,000	(54,000,000)	88,890,000	(164.61)
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(66,221,597)	66,221,597	(100)
LAIN-LAIN	(135,360,000)	169,259,061	(304,619,061)	(179.97)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	14,359,455,052	(567,431,417,297)	581,790,872,349	(102.53)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(4,516,077,852)	(586,918,108,769)	582,402,030,917	(99.23)
EKUITAS AKHIR	817,129,463,506	821,645,541,358	(4,516,077,852)	(0.55)

Keterangan :

FINAL

Bogor, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

IR. ANDI SAENAB
NIP 196804181996032001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (237263) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 3:03 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	100,964,310	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP	0	10,096,431
0.0	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	295,034,000	0
0.0	117131	Bahan Baku	287,098,000	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	178,579,080	0
0.0	131111	Tanah	710,697,857,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	34,327,593,095	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	75,120,330,659	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	2,430,357,250	0
0.0	134112	Irigasi	2,675,555,000	0
0.0	134113	Jaringan	346,734,300	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,154,325,015	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	33,025,673,326
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	32,358,538,063
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	2,405,115,988
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	890,238,152
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	209,064,745
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	225,085,113	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	22,508,511
0.0	162141	Paten	8,616,250	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	58,208,315,000	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	11,300,000	0
0.0	169314	Akumulasi Amortisasi Paten	0	5,745,350
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	11,300,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	17,520,994,476
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	3,091,757,034	0
0.0	313211	Transfer Keluar	69,782,390	0
0.0	391111	Ekuitas	0	821,645,541,358
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	34,890,000
0.0	391119	Koreksi Lainnya	135,360,000	0
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	2,320,501,034
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	41,785,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	166,069,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,500,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	2,340,000
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	505,000,000

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (237263) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 3:03 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	2,562,000
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	8,046,747,540
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	81,959,275
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,269,414,640	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	32,252	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	179,040,836	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	42,716,224	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	25,200,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	98,250,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	19,070,431	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	119,927,520	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	363,088,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	86,485,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	393,850,998	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	10,159	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	28,173,495	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	8,233,477	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	27,632,499	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	29,396,485	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	97,630,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	15,924,166	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	31,059,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	9,405,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	3,631,339,299	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	59,384,112	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	116,279,999	0
3.0	521211	Beban Bahan	729,016,666	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	732,848,200	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	871,118,472	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	22,540,397	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	12,507,840	0
3.0	522141	Beban Sewa	9,175,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	13,350,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	87,929,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	959,740,625	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	737,316,245	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	334,710,847	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	39,070,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (237263) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 3:03 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	822,769,873	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3,617,780,582	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	16,331,093	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	111,279,767	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	8,055,010	0
3.0	592114	Beban Amortisasi Paten	289,560	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	14,186,033	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	57,000	0
3.0	593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	2,484,507,840	0
3.0	593127	Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	316,400	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	568,672,700	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	9,373,929,994	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	267,353,942	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	157,014,075	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP	0	600,000
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	64,460,000
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	161,510,000	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	206,666,000	0
JUMLAH			**919,376,230,249**	**919,376,230,249**

Keterangan :

FINAL

Bogor, 6 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

IR. ANDI SAENAB

NIP 196804181996032001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (237263) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

Tgl Data : 06/05/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 06/05/26 3:03 PM

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	17,520,994,476
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	3,091,757,034	0
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	2,326,501,034
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	41,785,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	166,069,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,500,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	2,340,000
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	505,000,000
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	2,562,000
3.0	425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0	43,000,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,269,414,640	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	32,327	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	179,040,836	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	42,716,224	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25,200,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	98,250,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	19,070,431	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	119,927,520	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	363,088,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	86,485,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	393,850,998	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10,159	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	28,173,495	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	8,233,477	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	27,632,499	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	29,396,485	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	97,630,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	15,924,166	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	31,059,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	9,405,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,580,698,199	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	59,384,112	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	116,279,999	0
3.0	521211	Belanja Bahan	729,016,666	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	783,248,200	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	367,487,542	0
3.0	521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	2,787,697,500	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (237263) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

Tgl Data : 06/05/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 06/05/26 3:03 PM

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	1,813,806,250	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	871,118,472	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	22,540,397	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	12,748,940	0
3.0	522141	Belanja Sewa	9,175,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	13,350,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	87,929,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	959,740,625	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	737,316,245	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	334,710,847	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39,070,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	351,136,300	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	75
JUMLAH			**20,612,751,585**	**20,612,751,585**

Keterangan :

FINAL

Bogor, 6 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

IR. ANDI SAENAB

196804181996032001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 018**	**KEMENTERIAN PERTANIAN**
ESELON I	**: 09**	**BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0200**	**JAWA BARAT**
SATUAN KERJA	**: 237263**	**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/26 3:03 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 6/5/26 2:13 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,455,222,000	2,269,458,000	2,269,414,640	0	2,269,414,640	100	43,360
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	201,000	66,000	32,327	75	32,252	48.87	33,748
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	220,124,000	179,064,000	179,040,836	0	179,040,836	99.99	23,164
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	54,083,000	42,722,000	42,716,224	0	42,716,224	99.99	5,776
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25,600,000	25,200,000	25,200,000	0	25,200,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	324,000,000	98,250,000	98,250,000	0	98,250,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	25,200,000	19,085,000	19,070,431	0	19,070,431	99.92	14,569
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	132,000,000	119,932,000	119,927,520	0	119,927,520	100	4,480
511129	Belanja Uang Makan PNS	284,040,000	363,491,000	363,088,000	0	363,088,000	99.89	403,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	98,130,000	86,485,000	86,485,000	0	86,485,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	3,618,600,000	3,203,753,000	3,203,224,978	75	3,203,224,903	99.98	528,097
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	44,364,000	393,883,000	393,850,998	0	393,850,998	99.99	32,002
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	32,000	83,000	10,159	0	10,159	12.24	72,841
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	688,000	28,175,000	28,173,495	0	28,173,495	99.99	1,505
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	213,000	8,240,000	8,233,477	0	8,233,477	99.92	6,523
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4,698,000	27,720,000	27,632,499	0	27,632,499	99.68	87,501
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,821,000	29,398,000	29,396,485	0	29,396,485	99.99	1,515
511628	Belanja Uang Makan PPPK	9,240,000	98,517,000	97,630,000	0	97,630,000	99.1	887,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	15,930,000	15,924,166	0	15,924,166	99.96	5,834
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	62,056,000	601,946,000	600,851,279	0	600,851,279	99.82	1,094,721
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	44,550,000	31,426,000	31,059,000	0	31,059,000	98.83	367,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	10,170,000	9,405,000	0	9,405,000	92.48	765,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	44,550,000	41,596,000	40,464,000	0	40,464,000	97.28	1,132,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	3,725,206,000	3,847,295,000	3,844,540,257	75	3,844,540,182	99.93	2,754,818
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,688,592,000	3,583,354,000	3,580,698,199	0	3,580,698,199	99.93	2,655,801
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	81,548,000	59,546,000	59,384,112	0	59,384,112	99.73	161,888
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	116,280,000	116,280,000	116,279,999	0	116,279,999	100	1
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	3,886,420,000	3,759,180,000	3,756,362,310	0	3,756,362,310	99.93	2,817,690

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 018**	**KEMENTERIAN PERTANIAN**
ESELON I	**: 09**	**BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0200**	**JAWA BARAT**
SATUAN KERJA	**: 237263**	**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/26 3:03 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 6/5/26 2:13 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	348,568,000	853,650,000	729,016,666	0	729,016,666	85.4	124,633,334
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,505,833,000	783,310,000	783,248,200	0	783,248,200	99.99	61,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,854,401,000	1,636,960,000	1,512,264,866	0	1,512,264,866	92.38	124,695,134
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	339,600,000	373,049,000	367,487,542	0	367,487,542	98.51	5,561,458
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	0	2,787,850,000	2,787,697,500	0	2,787,697,500	99.99	152,500
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	4,243,040,000	1,813,818,000	1,813,806,250	0	1,813,806,250	100	11,750
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	4,582,640,000	4,974,717,000	4,968,991,292	0	4,968,991,292	99.88	5,725,708
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	960,000,000	871,296,000	871,118,472	0	871,118,472	99.98	177,528
522112	Belanja Langganan Telepon	10,200,000	22,800,000	22,540,397	0	22,540,397	98.86	259,603
522113	Belanja Langganan Air	13,200,000	13,200,000	12,748,940	0	12,748,940	96.58	451,060
522141	Belanja Sewa	0	9,200,000	9,175,000	0	9,175,000	99.73	25,000
522151	Belanja Jasa Profesi	0	13,350,000	13,350,000	0	13,350,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	196,250,000	88,176,000	87,929,000	0	87,929,000	99.72	247,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,179,650,000	1,018,022,000	1,016,861,809	0	1,016,861,809	99.89	1,160,191
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	484,698,000	959,909,000	959,740,625	0	959,740,625	99.98	168,375
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,040,913,000	737,568,000	737,316,245	0	737,316,245	99.97	251,755
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,525,611,000	1,697,477,000	1,697,056,870	0	1,697,056,870	99.98	420,130
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	184,300,000	840,250,000	334,710,847	0	334,710,847	39.83	505,539,153
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,200,000	49,250,000	39,070,000	0	39,070,000	79.33	10,180,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	189,500,000	889,500,000	373,780,847	0	373,780,847	42.02	515,719,153
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	13,218,222,000	13,975,856,000	13,325,317,994	0	13,325,317,994	95.35	650,538,006
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	352,630,000	351,136,300	0	351,136,300	99.58	1,493,700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	352,630,000	351,136,300	0	351,136,300	99.58	1,493,700
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	352,630,000	351,136,300	0	351,136,300	99.58	1,493,700
	JUMLAH BELANJA	16,943,428,000	18,175,781,000	17,520,994,551	75	17,520,994,476	96.4	654,786,524